#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan suatu pekerjaan dan visi tertentu yang ingin dicapai, suatu kantor atau instansi pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang selalu berperan aktif dan terkadang dominan dalam berbagai kegiatan,baik dalam segi tenaga maupun dalam segi pemikiran. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan manusia sebagai perencana, pelaku dari penentu terwujudnya suatu tujuan. Dalam hal ini adalah pegawai, menurut Robbins (Perilaku Organisasi, Edisi 10: 2006) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesempatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya peran seorang pegawai sangat mendukung suatu pencapaian suatu instansi,untuk mencapai suatu tujuan instansi dibutuhkanadanya balas jasa atau pembayaran gaji yang sesuai, hal tersebutakanmenjadi salah satu usaha untuk memicu kinerja seorang pegawai.

Gaji merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang paling besar diberikan sebuah instansi sebagai balas jasa kepada pegawainya, dan bagi pegawai ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka, juga sebagai sumber motivasi dalam bekerja. Dengan memberikan balas jasa kepada pegawai,dapat memberikan manfaat bagi sebuah instansi untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan dalam organisasi dan memotivasi pekerja agar menujukan prestasi yang terbaik yang dimilikinya.

Di samping itu proses penatausahaan pembayaran gaji juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan dalam sebuah instansi. Agar tidak terjadi

penyimpangan atau kecurangan, maka harus dilakukan pemisahan tugas antar bagian untuk menghindari persekongkolan antar sesama, untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan dan untuk memudahkan pekerjaan bagi petugas yang diserahi tugas perhitungan gaji. Hal seperti itu juga dapat terjadi pada bagian keuangan dalam bentuk pengeluaran uang kantor seperti pembayaran gaji, upah tenaga kerja atau balas jasa dari tenaga dan pikiran yang disumbangkan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu aspek penting dari perubahan struktur anggaran negara adalah diwajibkan Pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyusun anggaran (APBN dan APBD) dengan pendekatan kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Artinya setiap dana yang dialokasikan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun dengan hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Dibidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sesuai amanat pasal 31 undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota harus menyampaikan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK, kepada DPRD selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 1.1 Data Gaji dan Tunjangan Pegawai Selama Periode 2014-2018 di DPRD Kota Sawahlunto

TAHUN	JUMLAH
2014	Rp. 920.641.600.00,-
2015	Rp. 984.459.000.00,-
2016	Rp. 1.068.261.450.00,-
2017	Rp. 1.104.809.700.00,-
2018	Rp. 1.140.470.900.00,-

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memcoba mempelajari tentang prosedur pengeluaran gaji dan tunjangan, penulis memilih "DPRD Kota Sawahlunto" sebagai tempat pelaksanaan magang. Yang mengangkat judul "Prosedur Pengeluaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pada Kantor DPRD Kota Sawahlunto" untuk dapat melakukan penilaian sejauh mana instansi pemerintah ini melaksanakan penatausahaan dalam pengeluaran gaji dan tunjangan terhadap pegawai yang ada di instansinya, serta mencoba mecari informasi tentang kenaikan gaji yang terjadi setiap tahunnya pada instansi tersebut, dan apakah yang membuat pengeluaran gaji dan tunjangan di DPRD meningkat setiap tahunnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas penulis juga ingin mengetahui masalah tentang "Bagaimana Prosedur Pengeluaran Gaji dan Tunjangan Pegawai DPRD Kota Sawahlunto?"

## 1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan suatu mata kuliah wajib yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam praktik kerja/magang ini adalah "Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran gaji dan tunjangan pada pegawai DPRD Kota Sawahlunto."

#### 1.4 Manfaat Magang

Kegiatan magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktik-praktik pekerjaan yang nyata pada instansi pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi peserta magang sendiri. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini adalah:

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana prosedur pengeluaran gaji dan tunjangan pegawai pada kantor DPRD Kota Sawahlunto.
- b. Mengetahui masalah-masalah dan hambatan dalam prosedur penatausahaan pengeluaran gaji dan tunjangan.
- c. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.
- d. Terlatih untuk menyesuaikan diri dalam lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dalam kepribadian tentang kedisiplinan ilmu yang berbeda.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktik atau magang ini akan dilakukan di kantor DPRD Kota Sawahlunto yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman. Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto. Lamanya melakukan kegiatan magang ini selama 40 hari kerja.

# 1.6 Sistematika Laporan Magang

Dalam pembuatan laporan magang ini agar dapat lebih terarah dalam suatu pembuatannya, maka penulis membuat sistematika laporan yang terdiri dari beberapa bab yaitu:

# BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat magang, Tempat dan Waktu Magang, Sistematika Laporan Magang

## BAB II LANDASAN TEORI

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka, atau segala sesuatu yang menjadi landasan dalam menyelesaikan laporan magang ini.

## BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR DPRD KOTA SAWAHLUNTO

Membahas tentang Sejarah Kantor DPRD Kota Sawahlunto, Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto, Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto, Susunan, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Sawahlunto serta Kewajiban Anggota DPRD.

## BAB IV PEMBAHASAN

Penjelasan tentang "Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai pada Kantor DPRD Kota Sawahlunto".

## BAB V PENUTUP

Adalah penutup dari seluruh isi laporan yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran terhadap apa yang telah diuraikan mengenai Prosedur Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai pada Kantor DPRD Kota Sawahlunto.